

# Paku Alam dan Tionghoa Yogyakarta

## Hendra Kurniawan

HB III selain karena dukungan Notokusumo juga tidak lepas dari peran Tan Jin Sing, seorang Kapitan Tionghoa di Yogyakarta (1802-1813). Sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa, Tan Jin Sing menjadi tokoh yang cukup berpengaruh di Yogyakarta. Beliau memiliki relasi yang baik dengan John Crawford selaku kepanjangan tangan dari Raffles. Notokusumo dan Tan Jin Sing kemudian dipercaya menjadi penghubung antara pihak keraton dengan Inggris.

Setelah Pangeran Surojo berhasil naik tahta dan Notokusumo juga kemudian diangkat sebagai Paku Alam I, Tan Jin Sing pun diberi jabatan prestisius sebagai Bupati Yogyakarta (1813-1831). Tan Jin Sing juga dipercaya untuk membantu mengurus pungutan pajak di daerah Kedu. Tan Jin Sing kemudian diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Secodiningrat. Maka terjalinlah relasi kepemimpinan yang baik antara Sri Sultan HB III, Paku Alam I, dan KRT Secodiningrat sebagai Bupati Yogyakarta.

Kedudukannya sebagai Bupati membuat Tan Jin Sing semakin menghayati Kebudayaan Jawa. Ia bahkan dianggap menghasilkan suatu akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Kemampuan menjembatani berbagai budaya membuat Tan Jin Sing dijuluki *Cina wu-rung, Landa durung, Jawa tang-gung*. Saat itu pun mulai banyak pedagang Tionghoa yang tidak lagi menguasai Bahasa Tionghoa dan lebih sering menulis dengan menggunakan Aksara Jawa. Orientasi sosial budaya Tionghoa pada waktu itu lebih mengarah ke Jawa.

### Harmoni

Peran diplomatik yang dimainkan oleh Tan Jin Sing memperlihatkan bahwa hubungan Tionghoa dengan kraton sejak dulu begitu baik. Sampai pada tingkat

tertentu hal ini menyumbang terciptanya suatu atmosfer saling memahami dan menghormati antara Tionghoa dengan Jawa di Yogyakarta. Kenyataan sejarah ini menguatkan keberadaan dan peran Tionghoa yang tidak dapat diabaikan melainkan harus diterima secara sadar sebagai bagian dari bangsa ini. Termasuk adanya relasi Tionghoa dengan Kadipaten Pakualaman.

Kini, masyarakat Tionghoa memiliki harapan pula atas penobatan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo sebagai Paku Alam X. Sebagai *pengemban kabudayan*, Paku Alam X memiliki tanggung jawab moral untuk merangkul berbagai kalangan termasuk masyarakat Tionghoa seperti para pendahulunya. Budaya Tionghoa telah begitu banyak berakulturasi dengan budaya Jawa dan dapat memperkokoh keistimewaan Yogyakarta. Menilik sejarah maka hidup harmonis, rukun, dan damai perlu dipelihara agar tetap lestari. *Salamat berkarya untuk Sri Paduka Paku Alam X.*

\*) **Hendra Kurniawan MPd**,  
Dosen Pendidikan Sejarah  
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

**T**ANGGAL 7 Januari 2016 hari ini digelar perhelatan budaya, Jumenengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Paku Alam X. Penobatan ini menjadi momentum penting bagi keberlangsungan tahta Kadipaten Pakualaman yang merupakan warisan budaya dan sejarah. Apalagi terkait dengan aturan keistimewaan, keberadaan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memegang peran penting pula secara politis.

Kadipaten Pakualaman memiliki akar historis yang panjang, lebih dari 200 tahun. Kadipaten Pakualaman merupakan pecahan terakhir dari keturunan trah Mataram. Sebelumnya ada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang muncul akibat Perjanjian Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kemudian disusul Kadipaten Mangkunegaran yang merupakan pecahan dari Kasunanan Surakarta melalui Perjanjian Salatiga tahun 1757.

Kadipaten Pakualaman resmi berdiri tanggal 17 Maret 1813 ditandai dengan ditandatanganinya kontrak politik antara Pangeran Notokusumo dengan Residen Yogyakarta, John Crawford. Kala itu Pemerintah Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles tengah bercokol setelah berhasil merebut Pulau Jawa dari tangan Janssens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pengganti Daendels. Pangeran Notokusumo adalah putera dari Sri Sultan HB I yang berjasa dalam memberi dukungan atas naiknya Pangeran Surojo sebagai Sri Sultan HB III.

Atas jasanya itu Pangeran Notokusumo berhak atas 4000 cacah tanah yang meliputi wilayah di sebelah timur Kasultanan Yogyakarta dan Kabupaten Adikarto. Pangeran Notokusumo kemudian diangkat sebagai Pangeran Amardika (pangeran yang merdeka) dan menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam I. Bahkan Notokusumo juga diperkenankan memiliki 100 orang prajurit dan membangun istananya di dekat Kraton Yogyakarta.

### Tan Jin Sing

Naiknya Pangeran Surojo sebagai Sri Sultan